

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Ekonomi Regional

2.1.1 Konsep Dasar Ilmu Ekonomi Regional

Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang relatif cepat pada pertengahan tahun 1950-an. Pada tahun 1929, Weber untuk pertama kalinya mengembangkan ekonomi regional yang kemudian dilanjutkan oleh Ohlin pada tahun 1939 dan Losch pada tahun 1954. Ekonomi regional semakin terangkat eksistensinya setelah seorang mahasiswa asal Universitas Harvard yang bernama Walter Isard menulis disertasi yang berjudul “*Location and Space Economics*”. Kemudian pada tahun 1959, University Of Pennsylvania membuka departemen baru di kampusnya yang diberi nama *Regional Space Department* dengan pimpinan departemen yaitu Walter Isard. (Yusuf, 2012)

Ilmu ekonomi regional merupakan ilmu ekonomi yang membahas perbedaan potensi antarwilayah. Ilmu ekonomi regional memiliki keterkaitan dengan ilmu geografi ekonomi. Geografi ekonomi mempelajari gejala dari aktivitas yang terjadi di suatu wilayah, sehingga terdapat konsep dasar pemanfaatan ruang yang berlaku umum. Kemudian, geografi ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas aktivitas secara individual, yaitu mempelajari dampak dari aktivitas di suatu

wilayah terhadap aktivitas lain di wilayah yang berbeda. Sedangkan, ilmu ekonomi regional tidak mengulas suatu aktivitas, tetapi menganalisis wilayahnya secara keseluruhan atau menganalisis berbagai wilayah dengan keberagaman potensi yang kemudian analisis tersebut menjadi dasar dalam penentuan kebijakan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi semua wilayah. (Prisyarsono & Sahara, 2007)

Ilmu ekonomi regional juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menitikberatkan analisisnya pada pengaruh wilayah ke dalam analisis ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi regional merupakan perluasan dari ilmu ekonomi tradisional terhadap aspek lokasi dan tata ruang. Karena aspek ruang dibahas khusus dalam Teori Lokasi, maka ilmu ekonomi regional adalah gabungan ilmu ekonomi tradisional dengan Teori Lokasi. (Sjafrizal & Elfindri, 2008)

Dubey (1964, dikutip dalam Sjafrizal & Elfindri, 2008) mendefinisikan ilmu ekonomi regional sebagai studi dari sudut pandang ekonomi tentang perbedaan dan keterkaitan wilayah di alam semesta yang sumber dayanya tidak terdistribusi secara merata dan tidak termobilisasi secara sempurna. Salah satu penekanannya adalah pada penerapan perencanaan investasi modal sosial yang *overhead* untuk memitigasi masalah sosial yang tercipta oleh keadaan ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi regional adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada aspek wilayah/ruang. Ilmu ini menganalisis perbedaan potensi dan keterkaitan antar wilayah untuk menjadi dasar dalam penentuan kebijakan yang mengarah pada peningkatan ekonomi wilayah. Ilmu ekonomi regional menitikberatkan pada aspek

kewilayahannya dan tidak menekankan pada gejala/aktivitas sosial yang terjadi di dalamnya.

2.1.2 Permasalahan Pokok Ilmu Ekonomi Regional

Setiap disiplin ilmu memiliki permasalahan sendiri yang kemudian akan dipecahkan, termasuk ilmu ekonomi regional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Case dan Fair (2003, dikutip dalam Yusuf, 2012) yang menyatakan bahwa terdapat permasalahan yang melekat pada ilmu ekonomi tradisional, sebagai berikut.

1) *What*

Permasalahan yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi, sehingga muncul permasalahan dalam aktivitas produksi.

2) *How*

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana barang tersebut diproduksi. Hal ini menimbulkan masalah penggunaan dan mendorong aktivitas produksi. Permasalahan ini juga menyangkut teknologi apa yang efektif dan efisien dalam aktivitas produksi.

3) *Who*

Permasalahan ketiga berkaitan dengan siapa yang akan menggunakan hasil produksi tersebut, hal ini menyangkut dengan aspek pemasaran.

4) *When*

Pertanyaan selanjutnya adalah kapan waktu yang tepat barang tersebut di produksi. Hal ini mendorong munculnya analisis ekonomi yang dinamis.

5) *Where*

Pertanyaan yang masih belum dapat dijawab oleh ilmu ekonomi adalah di mana aktivitas produksi itu baik dilakukan. Hal ini menjadi sangat penting dalam ilmu ekonomi, karena kondisi wilayah dan tingkat upah antarwilayah berbeda, sehingga penentuan lokasi produksi menjadi konsentrasi utama dalam aktivitas produksi agar tercapai produktivitas dan distribusi produk yang efektif dan efisien.

Permasalahan terkait di mana lokasi yang baik untuk produksi barang menjadi dasar berkembangnya ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional menekankan pada aspek keberagaman potensi setiap wilayah, sehingga sangat dimungkinkan dengan ilmu ini dapat menganalisis wilayah yang memiliki potensi besar untuk aktivitas produksi, baik potensi kebutuhan *input* maupun peluang pasar (laku terjual) dari kegiatan produksi tersebut. Jika penentuan wilayah produksi sudah melalui analisis yang *proper*, maka produktivitas barang tersebut menjadi efektif dan efisien.

2.1.3 Tujuan dan Manfaat Ekonomi Regional

Tujuan dan manfaat ilmu ekonomi regional tidak jauh berbeda dengan tujuan dan manfaat ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi regional menjadi dasar dalam penentuan berbagai regulasi yang mengarah pada kesejahteraan perekonomian masyarakat. Menurut Ferguson (1965, dikutip dalam Yusuf, 2012) menyatakan bahwa tujuan utama regulasi di bidang ekonomi adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan ekonomi bertujuan untuk menciptakan *full employment* atau keadaan di mana tingkat pengangguran yang rendah pada suatu wilayah.

- 2) Kebijakan ekonomi sebagai alat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pendapatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Terciptanya kestabilan harga. Kestabilan harga menjadi salah satu faktor dalam terciptanya ketenangan dalam masyarakat. Jika stabilitas harga terguncang, maka masyarakat akan dihadapkan pada kegusaran terkait dengan apakah harta yang disimpan saat ini akan memiliki manfaat (nilai riil) yang akan berkurang di kemudian hari.

Sementara itu, manfaat dari ilmu ekonomi regional menurut Yusuf (2012) terbagi menjadi dua yaitu manfaat makro yang berkenaan dengan bagaimana pemerintah pusat memanfaatkan ilmu ini untuk menstimulus percepatan laju pertumbuhan wilayah secara keseluruhan. Contohnya, setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan kompetitif yang beragam, hal ini dapat dimanfaatkan pemerintah pusat untuk menetapkan skala prioritas yang berbeda sesuai dengan potensi setiap wilayah tersebut. Manfaat mikro yaitu ilmu ekonomi wilayah dapat membantu perencanaan wilayah untuk mengefisienkan waktu dan biaya dalam proses penentuan lokasi suatu produksi. Contohnya, perencanaan wilayah dalam penentuan lokasi produksi dapat menggunakan ilmu ekonomi regional dalam menentukan daerah mana yang memiliki keunggulan kompetitif yang sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Penggunaan ilmu ekonomi regional dalam penentuan lokasi sangat menghemat biaya, karena seorang perencanaan wilayah tidak perlu melakukan survei terhadap lokasi-lokasi yang memiliki cakupan sangat luas.

2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Menurut Tarigan (2005) pertumbuhan ekonomi regional adalah tambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yaitu naiknya nilai tambah (*value added*) yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Perhitungan pendapatan wilayah dibuat dalam bentuk riil (konstan) untuk mengetahui pertambahan nilai dari satu periode waktu ke periode waktu setelahnya. Pendapatan wilayah merepresentasikan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi pada wilayah tersebut, yang kemudian hal tersebut dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran wilayah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah dapat ditentukan dengan selain nilai tambah, yaitu dengan memperhatikan seberapa besar terjadinya *transfer payment* atau aliran dana dari luar wilayah maupun aliran dana ke luar wilayah.

Tarigan (2005) menyatakan bahwa terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan pertumbuhan wilayah, teori tersebut dituangkan dalam beberapa poin sebagai berikut.

2.2.1 Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik dikembangkan pertama kali oleh Adam Smith (1723-1790) yang membahas permasalahan ekonomi dalam bukunya yang berjudul “*An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*” (1776). Sebagaimana yang dituliskan oleh Tarigan (2005) menjelaskan bahwa inti dari ajaran Adam Smith terkait perekonomian adalah agar masyarakat sebagai pelaku ekonomi diberikan kebebasan yang luas untuk menentukan kegiatan ekonomi apa yang ingin ditekuninya. Smith berpendapat bahwa sistem pasar ekonomi yang bebas dapat menciptakan efisiensi pasar, mengarahkan ekonomi pada kondisi *full*

employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi hingga mencapai posisi stasioner. Posisi stasioner terjadi bilamana sumber daya alam seluruhnya telah dimanfaatkan dan terdapat pengangguran namun bersifat temporer. Pemerintah sebagai badan regulator tidak perlu banyak campur tangan dalam urusan perekonomian, pemerintah hanya perlu menciptakan keadaan dan menyediakan fasilitas yang menstimulasi para pelaku ekonomi agar dapat beraktivitas dengan optimal.

Pandangan Smith tersebut dikoreksi dan diperbarui oleh John Maynard Keynes (1936) akibat terjadinya depresi ekonomi dunia pada tahun 1929-1932, Keynes (1936, dikutip dalam Tarigan, 2005) berpendapat bahwa untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, pemerintah harus menjalankan kebijakan fiskal (pajak dan belanja pemerintah), moneter (jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga), dan melakukan pengawasan secara langsung. Ahli ekonomi setelah itu ada yang mendukung teori Smith dan ada juga yang mendukung teori Keynes, kedua kelompok ini memiliki pandangan yang sama bahwa salah tugas negara adalah menciptakan distribusi yang merata (kaitannya dengan *saving* dan konsumsi) sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu, para ahli ekonomi menyadari bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak namun swasta tidak tertarik untuk menanganinya tanpa adanya hak khusus yang diberikan. Misalnya penyediaan listrik, air bersih, dan telepon. Pihak swasta tidak tertarik untuk fokus pada sektor ekonomi tersebut jika tidak diberi hak monopoli, namun pemberian hak monopoli pada satu perusahaan tertentu dapat mengakibatkan

terjadinya ‘kecemburuan’ di masyarakat, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk mengelola sektor-sektor ini. Atau, apabila pengelolaannya diserahkan kepada swasta harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Teori yang dikembangkan oleh Adam Smith ini memiliki beberapa kekurangan, namun pandangannya masih banyak yang relevan untuk diaplikasikan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berdasarkan pendapat Smith, terdapat beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah agar terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai berikut.

- 1) Setiap pelaku ekonomi diberi kebebasan untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya dan harus sesuai dengan lokasi yang diperkenankan;
- 2) tidak membuat regulasi yang menghambat aliran barang dan jasa;
- 3) tidak membuat tarif pajak yang lebih tinggi di wilayah tersebut dibandingkan wilayah lain, karena ini dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak berminat membuka usaha pada wilayah tersebut;
- 4) menjaga keamanan dan ketertiban wilayah;
- 5) menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya efisiensi aktivitas ekonomi;
- 6) membuat prosedur penanaman modal yang sederhana; dan
- 7) menciptakan kondisi yang kondusif sehingga menarik para pemilik modal untuk melakukan penanaman modal di wilayah tersebut.

Teori Smith akan tumbuh pada keadaan pasar yang sempurna, sehingga pemerintah daerah harus berusaha seoptimal mungkin untuk menciptakan keadaan pasar yang mengarah pada pasar sempurna. Pemerintah daerah tidak memberikan

hak monopoli maupun hak monopsoni kepada pihak swasta, serta informasi tentang pasar disebarluaskan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

2.2.2 Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori pertumbuhan neoklasik diperkenalkan oleh Robert Merton Solow (Amerika Serikat, 1970) dan Trevor Winchester Swan (Australia, 1956). Model pertumbuhan neoklasik ini kemudian dikenal dengan nama model Solow-Swan. Sebagaimana yang ditulis oleh Tarigan (2005) dalam bukunya menjelaskan bahwa model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi dan besarnya *output* yang saling berinteraksi serta menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara modal dan tenaga kerja. Teori Solow-Swan ini melihat bahwa dalam banyak kondisi mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan pasar sehingga pemerintah tidak perlu banyak campur tangan dalam urusan perekonomian. Menurut teori ini, pemerintah ikut campur tangan sebatas membuat kebijakan terkait fiskal dan moneter. Hal ini relevan dengan teori ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan Keynes, sehingga para ahli ekonomi menyebut teori ini sebagai teori pertumbuhan ekonomi neoklasik.

Tingkat pertumbuhan menurut teori ini bersumber dari tiga sumber, yaitu akumulasi modal, penambahan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi terlihat dari peningkatan *skill* dan kemajuan teknik sehingga meningkatkan produktivitas per kapita. Dalam model ini, masalah teknologi dianggap sebagai fungsi dari waktu.

Teori neoklasik yang merupakan pembaharuan dari teori ekonomi klasik menyarankan agar mengarahkan keadaan pasar menuju pasar sempurna, sehingga perekonomian dapat tumbuh secara maksimal. Dalam mencapai keadaan pasar sempurna, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu meniadakan hambatan aktivitas perdagangan (perpindahan barang, tenaga kerja, dan modal), memastikan kelancaran arus perekonomian (barang, kapital, dan tenaga kerja), dan menyebarluaskan informasi terkait pasar. Teori neoklasik sangat memperhatikan kemajuan teknologi, yang dapat ditempuh dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Model Neoklasik mengasumsikan bahwa *Investment = Saving*. Hal ini menjadi poin yang harus diperhatikan, karena kebiasaan masyarakat yang menyimpan (*saving*) uang mereka tidak di bank maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kebiasaan tersebut perlu diubah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi. Analisis paham Neoklasik memperlihatkan bahwa untuk mencapai keadaan *steady growth*, diperlukan tingkat *saving* yang tepat dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di wilayah tersebut.

2.2.3 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat Yang Disinergikan (*Turnpike*)

Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (*Turnpike*) pertama kali dikembangkan oleh Samuelson pada tahun 1955. Sebagaimana yang ditulis oleh Tarigan (2005), menyatakan bahwa setiap wilayah perlu memperhatikan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi sumber daya alam maupun karena sektor tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk dikembangkan. Hal ini memiliki makna bahwa dengan kebutuhan modal

yang sama, sektor tersebut dapat memberikan *value added* yang lebih besar, berproduksi dalam waktu relatif singkat, dan kontribusi untuk perekonomian relatif besar. Agar pasarnya terjamin, produk dari sektor tersebut harus menembus pasar luar wilayah, sehingga perkembangan sektor tersebut dapat menjadi stimulus bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan implikasinya terjadi pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Menyinerigkan sektor-sektor menurut Tarigan (2005) adalah membuat sektor-sektor saling terhubung dan saling mendukung. Contohnya, usaha perkebunan yang bersinergi dengan usaha peternakan. Rumput dari perkebunan dapat dijadikan pakan ternak, dan kotoran dari peternakan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan menyinerigkannya dengan sektor lain yang terkait dapat membuat perekonomian tumbuh cepat.

2.2.4 Teori Basis Ekonomi

2.2.4.1 Konsep Dasar

Menurut Tarigan (2005), teori basis ekonomi berpandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Sektor basis merupakan sektor perekonomian yang memiliki sifat *exogenous* atau tidak tergantung pada permintaan lokal. Sektor basis berkaitan erat dengan kegiatan ekspor dari wilayah ke luar wilayah tertentu. Suatu sektor ekonomi

dikatakan sektor basis ketika dapat memenuhi kebutuhan dalam wilayah dan dapat mengekspor produk ke luar wilayah tersebut. Sedangkan, sektor nonbasis merupakan sektor yang hanya memenuhi kebutuhan lokal, karena karakteristiknya yang memenuhi kebutuhan lokal maka permintaan sektor nonbasis sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, sektor nonbasis terikat dengan keadaan ekonomi setempat dan tidak dapat tumbuh melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesimpulannya, hanya sektor basis yang dapat meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan alamiah.

2.2.4.2 Metode Penentuan Sektor Basis dan Sektor Nonbasis

Langkah selanjutnya dalam analisis basis ekonomi adalah menentukan sektor basis dan sektor nonbasis pada wilayah analisis. Menurut Tarigan (2005) terdapat beberapa metode yang lazim digunakan sebagai alat menentukan sektor basis dan nonbasis sebagai berikut.

1) Metode Langsung

Metode langsung dilakukan dengan cara survei/peninjauan langsung kepada para pelaku usaha dengan mencari informasi terkait distribusi produk yang dihasilkan, apakah dipasarkan pada wilayah analisis atau dipasarkan juga keluar wilayah analisis (ekspor) dan menggali informasi dari mana para pelaku usaha membeli/mendapat bahan baku dalam produksi barang mereka. Hasil dari survei tersebut dapat digunakan sebagai data untuk menentukan sektor basis maupun nonbasis. Namun dalam praktiknya, metode ini kurang akurat dan tidak efisien, karena terlalu banyak sumber daya yang harus dikeluarkan dan sulitnya menggali

informasi dari para pelaku usaha (seperti pendapatan dan pengeluaran dari usaha), sehingga hasil yang dikeluarkan memiliki tingkat keakuratan rendah.

2) Metode Tidak Langsung

Metode ini menitikberatkan kepada asumsi dalam penentuan sektor basis atau nonbasis, asumsi yang digunakan berdasarkan pada data yang diperoleh dari pihak lain (data sekunder). Misalnya, sektor-sektor yang diketahui produknya banyak di ekspor ke luar wilayah (hasil tambang, tembakau, karet, kakao, dan sebagainya) dan/atau aktivitas dalam wilayah yang mendatangkan uang dari luar wilayah (pariwisata serta kampus dan rumah sakit yang biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat) digolongkan menjadi sektor basis. Sementara, kegiatan yang tidak termasuk asumsi di atas otomatis menjadi sektor nonbasis.

3) Metode Campuran

Metode ini merupakan gabungan antara metode langsung dan tidak langsung. Metode campuran menggunakan data sekunder untuk analisis awal sektor-sektor mana saja yang dianggap basis dan nonbasis. Setelah melakukan analisis dengan data sekunder, kemudian dilakukan survei lapangan terhadap sektor-sektor tersebut.

4) Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode lain yang dapat digunakan dalam penentuan sektor basis dan nonbasis tanpa survei langsung adalah analisis *Location Quotient*. Analisis LQ membandingkan porsi tenaga kerja/pendapatan (nilai tambah) untuk sektor tertentu di wilayah analisis (daerah) dibandingkan dengan porsi tenaga kerja/pendapatan (nilai tambah) untuk sektor yang sama di wilayah referensi (nasional). Analisis LQ akan dibahas lebih lanjut pada **Subbab 2.5**.

2.3 Perubahan Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan komposisi kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral. Menurut Tambunan (2009, dikutip dalam Louhenapess, 2014), pembangunan ekonomi jangka panjang yang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional akan mengubah secara mendasar struktur perekonomian yang mulanya tradisional (agraris sebagai sektor utama) menjadi modern (didominasi industri manufaktur). Sejalan dengan pernyataan Ghalib (2005, dikutip dalam Louhenapess, 2014) yang menyatakan bahwa sasaran dari pembangunan jangka panjang adalah terjadinya perubahan struktur ekonomi di wilayah tersebut.

Menurut Todaro dan Smith (2015), teori perubahan struktur ekonomi berfokus pada mekanisme di mana ekonomi berkembang dengan mengubah struktur ekonomi domestik dari yang menitikberatkan pada sektor agraris ke sektor yang lebih modern, lebih urbanisasi, serta ekonomi manufaktur dan jasa yang lebih beragam secara industri. Berdasarkan definisi teori perubahan struktural tersebut, Todaro dan Smith (2005) menjelaskan lebih lanjut mengenai transformasi struktural, mereka berpendapat transformasi struktural adalah proses perubahan ekonomi sedemikian rupa sehingga kontribusi untuk pendapatan nasional dari sektor manufaktur dapat melampaui kontribusi dari sektor agraris.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (2020), lapangan usaha dibagi menjadi sembilan sektor, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa lainnya.

Menurut Sukirno (2006, dikutip dalam Louhenapess, 2014), berdasarkan lapangan usaha sebagaimana diuraikan di atas maka sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut.

1) Sektor Primer

Sektor primer merupakan sektor ekonomi tradisional yang berfokus pada pemanfaatan lahan pertanian. Sektor primer terdiri dari Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Sektor Pertambangan dan Penggalian.

2) Sektor Sekunder

Sektor sekunder merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada industri manufaktur. Sektor sekunder terdiri dari Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Sektor Konstruksi.

3) Sektor Tersier

Sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berfokus pada sektor jasa-jasa. Sektor tersier terdiri dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Sektor Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi; Sektor Real Estat; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Sektor Jasa lainnya.

Pada umumnya, transformasi/perubahan struktur ekonomi yang terjadi di negara berkembang adalah perubahan dari sektor agraris (sektor primer) menjadi sektor industri (sektor sekunder).

2.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Mankiw (2016) Produk Domestik Bruto adalah total pendapatan yang diperoleh di dalam negeri (domestik), termasuk pendapatan yang diperoleh dari faktor produksi yang dimiliki entitas asing dan total pengeluaran barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dalam menghitung seberapa baik kinerja perekonomian di suatu wilayah. Terdapat dua cara dalam melihat PDB, cara pertama adalah melihat PDB sebagai total pendapatan dari seluruh masyarakat dalam perekonomian, dan cara lainnya adalah melihat PDB sebagai total pengeluaran atas barang dan jasa dalam perekonomian.

Pendapatan Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah bruto yang dihasilkan suatu daerah atas aktivitas ekonomi. Pembuatan PDRB dapat dilakukan dalam tiga pendekatan yaitu pendekatan pengeluaran, produksi, dan pendapatan yang disajikan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku (nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada saat waktu penghitungan dan memiliki tujuan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu wilayah.

Sedangkan, PDRB atas harga konstan disusun berdasarkan tahun dasar dan memiliki tujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. (Badan Pusat Statistik, 2020)

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan per orang dalam wilayah tersebut. PDRB per kapita merupakan hasil pembagian antara PDRB dengan total penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi PDRB per kapita menandakan bahwa semakin baik tingkat kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut.

2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient merupakan analisis penentuan sektor basis dan non-basis suatu wilayah. Menurut Page dan Patton, (1991) *Location Quotient* adalah perhitungan rasio sederhana yang menghitung konsentrasi dari beberapa aktivitas dalam sebuah wilayah analisis yang relatif terhadap wilayah referensi. Teknik analisis LQ dengan data ekonomi sering digunakan sebagai salah satu cara untuk menentukan di mana industri terkonsentrasi dan sektor ekonomi mana yang menghasilkan produk yang dapat di ekspor/keluar dari wilayah analisis.

Menurut Tarigan (2005), *Location Quotient* merupakan perbandingan besaran kontribusi suatu sektor tertentu di wilayah analisis (daerah) terhadap besaran kontribusi sektor yang sama pada wilayah referensi (nasional). Metode penentuan sektor basis dan non-basis suatu wilayah menggunakan analisis LQ berdasarkan pada rumus yang diungkapkan oleh Tarigan (2005) sebagai berikut.

$$LQ = \frac{x_i}{\text{PDRB (kab/kota)}} / \frac{X_i}{\text{PDRB (provinsi)}}$$

keterangan :

LQ = *Location Quotient*

x_i	= nilai tambah sektor i pada wilayah kabupaten/kota
X_i	= nilai tambah sektor i pada wilayah provinsi
PDRB (kab/kota)	= Pendapatan Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota
PDRB (provinsi)	= Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi

Metode penghitungan *Location Quotient* adalah dengan membandingkan aktivitas ekonomi suatu wilayah analisis dengan wilayah referensi yang memiliki cakupan lebih luas. Contohnya, jika wilayah analisis adalah kabupaten/kota maka wilayah referensinya adalah provinsi.

Perhitungan *Location Quotient* dengan rumus sebagaimana diuraikan di atas jika menghasilkan nilai satu ($LQ = 1$), maka tingkat konsentrasi/basis sektor yang dihitung pada wilayah analisis memiliki tingkat yang sama dengan wilayah referensi. Apabila nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) mengindikasikan bahwa tingkat konsentrasi/basis sektor yang dihitung pada wilayah analisis memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah referensi, sehingga sektor tersebut adalah sektor basis yang menghasilkan porsi lapangan kerja lebih banyak dan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri serta dapat di ekspor keluar wilayah tersebut. Namun, jika nilai LQ lebih kecil dari satu ($LQ < 1$), maka menggambarkan bahwa tingkat konsentrasi/basis sektor yang dianalisis pada wilayah analisis memiliki tingkat konsentrasi yang lebih rendah dari wilayah referensi, sehingga sektor tersebut disebut dengan sektor non-basis dan memberikan kontribusi relatif kecil terhadap PDRB provinsi.

Kesimpulannya, nilai LQ yang lebih dari satu ($LQ > 1$) mengindikasikan bahwa sektor pada wilayah tersebut mempunyai potensi yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, sehingga analisis ini dapat dijadikan salah satu cara dalam penentuan kebijakan pemerintah terkait kesejahteraan ekonomi.

2.6 Analisis *Shift Share*

Menurut Page dan Patton (1991) *Shift-Share* merupakan analisis yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana perubahan aktivitas di satu wilayah adalah berbeda dari beberapa wilayah referensi. Teknik analisis *Shift-Share* digunakan untuk menunjukkan sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi nasional. Teknik ini menggambarkan kinerja sektor pada wilayah analisis dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Menurut Bendavid-Val (1983, dikutip dalam Soepono, 1993) menjelaskan bahwa teknik analisis *Shift-Share* ini membagi pertumbuhan sebagai perubahan (D) yaitu seperti kesempatan kerja, nilai tambah, pendapatan, selama periode tertentu menjadi pengaruh terhadap pertumbuhan nasional (N), bauran industri (M), dan keunggulan kompetitif (C). Pengaruh pertumbuhan nasional disebut dengan *share*, pengaruh bauran industri disebut dengan *proportional shift*, dan pengaruh keunggulan kompetitif disebut dengan *differential shift*.

Menurut Tarigan (2005), analisis *shift-share* memiliki kesamaan dengan analisis LQ, di mana analisis *shift-share* juga membandingkan perbedaan dari laju pertumbuhan sektor tertentu di wilayah analisis dengan wilayah referensi. Namun,

analisis *shift-share* memiliki tingkat kedalaman analisis yang lebih baik dibandingkan dengan analisis LQ. Analisis LQ tidak menjelaskan faktor penyebab terjadinya perubahan pada sektor yang di analisis, sedangkan analisis *shift-share* merinci secara detail beberapa variabel penyebab perubahan. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya.

Analisis *shift-share* dalam bentuk notasi aljabar dinyatakan pada uraian berikut.

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Di mana :

D_{ij} = perubahan sektor i pada wilayah j

N_{ij} = pertumbuhan sektor i pada wilayah j

M_{ij} = bauran industri sektor i pada wilayah j

C_{ij} = keunggulan kompetitif sektor i pada wilayah j

Menurut Tarigan (2005), penambahan *value added* regional total dapat dibagi menjadi komponen *shift* dan komponen *share*, yang kemudian komponen *shift* terbagi dua yaitu *propotional shift* dan *differential shift*. Menurut Arsyad (2005, dikutip dalam Sapriadi dan Hasbiullah, 2015) komponen pertumbuhan (D_{ij}) terbagi menjadi tiga komponen sebagai berikut.

- 1) Pengaruh pertumbuhan nasional (N) (*National Share*) diukur dengan menganalisis pengerjaan perubahan agregat sektoral yang dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian wilayah referensi.

Notasi matematis untuk perhitungan komponen ini sebagai berikut.

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n$$

keterangan :

N_{ij} = Pertumbuhan sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

E_{ij} = PDRB sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

r_n = Laju pertumbuhan PDRB di daerah n (Provinsi Sumatera Utara)

Di mana notasi r_n diperoleh dengan hitungan sebagai berikut.

$$r_n = \frac{(e_n^* - e_n)}{e_n}$$

keterangan :

e_n^* = PDRB Provinsi Sumatera Utara pada akhir tahun analisis

e_n = PDRB Provinsi Sumatera Utara pada suatu tahun dasar tertentu

- 2) Pengaruh perubahan proporsional atau bauran industri (M) (*proportional shift*), mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada wilayah analisis yang dibandingkan dengan perekonomian pada wilayah referensi. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah perekonomian di wilayah analisis terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi.

Notasi matematis untuk perhitungan komponen ini sebagai berikut.

$$M_{ij} = E_{ij} \times (r_{in} - r_n)$$

keterangan :

M_{ij} = bauran industri sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

E_{ij} = PDRB sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

r_{in} = laju pertumbuhan sektor i pada wilayah n (Provinsi)

r_n = Laju pertumbuhan PDRB di daerah n (Provinsi Sumatera Utara)

Di mana notasi r_{in} diperoleh dengan hitungan sebagai berikut.

$$r_{in} = \frac{(e^*_{in} - e_{in})}{e_{in}}$$

keterangan :

e^*_{in} = PDRB sektor i di tingkat provinsi pada tahun terakhir analisis

e_{in} = PDRB sektor i di tingkat provinsi pada suatu tahun dasar tertentu

- 3) Pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif (C) menentukan seberapa kuat daya saing sektor di wilayah analisis dengan perekonomian pada wilayah referensi, di mana jika hasil perhitungan C_{ij} positif, maka sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian di wilayah referensi.

Notasi matematis untuk perhitungan komponen ini sebagai berikut.

$$C_{ij} = E_{ij} \times (r_{ij} - r_{in})$$

Keterangan :

C_{ij} = keunggulan kompetitif sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

E_{ij} = PDRB sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

r_{ij} = laju pertumbuhan PDRB sektor i pada wilayah j (Kabupaten/Kota)

r_{in} = laju pertumbuhan PDRB sektor i pada wilayah n (Provinsi)

Di mana notasi r_{ij} diperoleh dengan hitungan sebagai berikut.

$$r_{ij} = \frac{(e^*_{ij} - e_{ij})}{e_{ij}}$$

keterangan :

e^*_{ij} = PDRB sektor i di wilayah j pada tahun terakhir analisis

e_{ij} = PDRB sektor i di wilayah j pada suatu tahun dasar tertentu

Menurut Karrina (2018), hasil perhitungan masing-masing komponen *shift share* dapat diinterpretasikan sebagai berikut.

- 1) Jika nilai *shift share* sektor i (D_{ij}) > 0 , maka sektor i di wilayah j mengalami peningkatan kinerja ekonomi.
- 2) Jika nilai *proportional shift* sektor i (M_{ij}) > 0 , maka sektor i di wilayah j mengalami pertumbuhan yang relatif cepat dibandingkan dengan sektor i di wilayah n (referensi).
- 3) Jika nilai *differential shift* sektor i (C_{ij}) > 0 , maka sektor i di wilayah j memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada wilayah n (referensi).

Menurut Freddi (2001, dikutip dalam Muta'ali, 2015) sektor ekonomi memiliki empat tipe posisi relatif dengan didasarkan pada *Proportional Shift* (M) dan *Differential Shift* (C) sebagai berikut.

- 1) Tipe I, yaitu ketika suatu sektor memiliki M dan C yang positif, artinya sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat cepat (*fast growing*)
- 2) Tipe II, yaitu ketika suatu sektor memiliki M negatif dan C positif, artinya pertumbuhan sektor tersebut lambat tetapi dapat berkembang.
- 3) Tipe III, yaitu ketika suatu sektor memiliki M positif dan C negatif, artinya sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat namun potensial.
- 4) Tipe IV, yaitu ketika suatu sektor memiliki M negatif dan C negatif, artinya sektor tersebut mengalami pertumbuhan yang lambat serta daya saing lemah (*depressed region*).

Menurut Soepono (1993), analisis *shift share* memiliki beberapa keterbatasan teoritis yang diuraikan pada poin-poin berikut.

- 1) Metode *shift share* tidak dapat digunakan untuk menggambarkan mengapa terdapat keunggulan kompetitif yang positif pada wilayah tertentu tetapi negatif di beberapa wilayah lain. Metode *shift share* merupakan metode yang menitikberatkan pada perhitungan (*accounting*) dan tidak analitis.
- 2) Komponen pertumbuhan nasional mengisyaratkan bahwa setiap sektor di suatu wilayah seyogyanya tumbuh ekuivalen dengan pertumbuhan nasional. Prinsip ini dianggap terlalu sederhana, sehingga memungkinkan terjadinya bias dalam analisis.
- 3) Komponen *shift* yaitu *proportional shift* dan *differential shift* memiliki kaitan yang sama, seperti perubahan *demand* dan *supply*, perubahan teknologi, dan perubahan lokasi. Sehingga, terdapat kesulitan dalam membedakan perilaku ekonomi kedua komponen tersebut.
- 4) Teknik analisis *shift share* terlalu naif, karena mengasumsikan semua barang dijual secara nasional.

2.7 Analisis Korelasi

Menurut Triola (2015), korelasi merupakan tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Menurut (Supranto, 2009), analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui erat-tidaknya hubungan antar variabel.

Rumus untuk perhitungan korelasi menurut Triola (2015) sebagai berikut.

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \sqrt{n(\sum y^2) - (\sum y)^2}}$$

keterangan :

n = jumlah pasangan data sampel

$\sum$ = denotasi untuk penambahan

$\sum x$ = total dari semua nilai x

$\sum x^2$ = setiap nilai x dikuadratkan, kemudian jumlah kuadrat tersebut ditambahkan

$(\sum x)^2$ = setiap nilai x ditambahkan, kemudian hasil penambahan x dikuadratkan

$\sum xy$ = setiap nilai x dikalikan dengan y , kemudian dijumlahkan

r = koefisien korelasi linier untuk data sampel

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat bahasan mengenai perubahan struktur ekonomi yang menjadi referensi bagi penulis dalam menulis tulisan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Fadhilah (2010) melakukan penelitian pada tesisnya yang berjudul Analisis Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, menggunakan analisis *Location Quotient* serta data sekunder berupa *time series* dari tahun 1983 sampai 2008 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian mengindikasikan terjadinya perubahan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 1994-1997 dan tahun 2000-2008. Ditemukan bahwa semakin tinggi kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam peningkatan produksi dan pendapatan maka akan semakin kecil kontribusi sektor tersebut dalam menampung tenaga kerja.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, disimpulkan bahwa terdapat tiga sektor yang menjadi sektor unggulan, yaitu sektor pertanian, pengangkutan, dan perdagangan.

- 2) Petrarobot dkk. (2016) dalam jurnal penelitiannya mengangkat judul Analisis Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Minahasa dari Tahun 2001-2013, menggunakan analisis *Klassen Tipology*, analisis *Location Quotient*, dan analisis *Shift-Share* serta menggunakan data sekunder berupa PDRB Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2001-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi perekonomian Kabupaten Minahasa yang dianalisis menggunakan tiga alat analisis. Terdapat beberapa kategori sektor, yaitu sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (sektor pertambangan dan penggalian), sektor basis (sektor pertanian, pertambangan dan penggalaian, listrik, gas dan airbersih, serta sektor bangunan), dan sektor kompetitif (sektor pertambangan dan penggalian).
- 3) Hasan (2017) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Struktur Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki beberapa tujuan penelitian, yaitu 1) mengetahui struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja; 2) pengaruh struktur ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja; dan 3) pengaruh struktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis *Location Quotient*, dan analisis *Shift-Share*, sedangkan untuk mengukur pengaruh struktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, dilakukan dengan dua tahap, yaitu tahap pertama dengan menganalisis langsung pengaruh struktur ekonomi

terhadap tingkat kemiskinan dan tahap kedua menganalisis pengaruh struktur ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dengan penyerapan tenaga kerja. Hasil dari penelitian ini menjawab beberapa tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu 1) hasil analisis menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar didominasi dengan sektor primer; 2) hasil analisis data menggunakan *Path Analysis* menunjukkan bahwa struktur ekonomi berpengaruh cukup signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar 55%; 3) dan struktur ekonomi berpengaruh sebesar 40% terhadap tingkat kemiskinan.

- 4) Aswadi dan Azhari (2016) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Transformasi Struktur Ekonomi dalam Pembangunan Regional di Kabupaten Aceh. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab permasalahan terkait dengan kontribusi sektor primer, sekunder, dan tersier dalam struktur perekonomian Kabupaten Aceh Besar dan bagaimana transformasi struktur ekonomi dalam pembangunan regional di Kabupaten Aceh Besar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis *shift-share*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, periode 2010-2013 kontribusi sektor primer dan sekunder mengalami penurunan terhadap pembentukan PDRB, sedangkan sektor tersier mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan adanya transformasi struktur ekonomi. Hasil analisis *shift-share* menunjukkan bahwa pada periode 2000-2013 terdapat enam sektor ekonomi yang mengalami pergeseran, yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih yang bergeser dari posisi tidak kompetitif dan berspesialisasi menjadi tidak kompetitif dan

tidak berspesialisasi. Kemudian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa mengalami pergeseran dari keunggulan kompetitif dan tidak berspesialisasi menjadi memiliki keunggulan kompetitif dan berspesialisasi. Selanjutnya, sektor pertambangan dan penggalan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor konstruksi tidak mengalami perubahan.

- 5) Sapriadi dan Hasbiullah (2015) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan perekonomian di Kabupaten Bulukumba. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa PDRB Kabupaten Bulukumba dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dalam rentang tahun 2018-2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis *Location Quotient* dan *Shift Share*. Hasil penelitian dengan alat analisis tersebut menunjukkan bahwa sektor yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bulukumba dengan kriteria tergolong ke dalam sektor basis dan kompetitif adalah sektor jasa-jasa.